

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang berlandaskan ideologi Pancasila dan menganut sistem demokrasi. Penerapan ideologi Pancasila bertujuan mengayomi kemajemukan demi persatuan bangsa Indonesia. Namun dalam realitas kehidupan bangsa, terdapat gerakan keagamaan yang berusaha mengganti ideologi Pancasila dan sistem demokrasi berdasarkan perspektif agama tertentu. Salah satu gerakan keagamaan tersebut ialah Islamisme khususnya melalui organisasi kemasyarakatan Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI). HTI memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia sebagai bagian dari cita-cita mendirikan kekhalifahan Islam dunia.<sup>1</sup> Dengan demikian, HTI merupakan perwujudan dari Islamisme dan menjadi bagian dari gerakan ini. Maka usaha pertama mengkaji tentang HTI ialah membahas gerakan Islamisme sekaligus upaya islamisasi.

Islamisme adalah paham yang ingin menjadikan Islam sebagai satu-satunya hukum universal sebagai perlawanan terhadap hegemoni peradaban Barat. Ciri khas Islamisme ialah adanya usaha menegakkan Khilafah Islam dan penerapan hukum Syariat sebagai konstitusi negara. Adapun cita-cita politis Islamisme bersifat global demi mengakhiri dominasi peradaban Barat dan menggantinya dengan tatanan politik Islam. Gerakan Islamisme hendak menempatkan Islam sebagai hukum universal yang dimulai dari wilayah muslim Arab hingga dunia internasional.<sup>2</sup> Islamisme berusaha menempatkan Islam sebagai ideologi tunggal tanpa memikirkan konteks sosial masyarakat yang multikultural dan multireligius. Dengan demikian, Islamisme dinilai berbahaya karena mengarah pada tatanan masyarakat tertutup, anti-pluralitas dan fundamentalisme agama. Gerakan radikalisme selalu memiliki empat karakteristik

---

<sup>1</sup> Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 5.

<sup>2</sup> Bernard Raho, Mathias Daven, dan Hendrikus Maku, "Benih-Benih Ideologi Islamisme Radikal di Kalangan Sejumlah Mahasiswa NTT", *Jurnal Ledalero*, Vol. 19, No. 1 (Ledalero: 1 Juni 2020), hlm. 5.

yakni intoleransi, fanatisme, eksklusivisme, dan revolusioner.<sup>3</sup> Gerakan Islamisme tidak mengenal diskursus karena mengklaim bahwa kebenaran absolut hanya termanifestasi dalam Syariat Islam. Konsekuensi logis yang terjadi ialah Islamisme membagi manusia sebagai orang benar (Islam) dan kaum kafir (non-muslim). Perspektif ini kemudian melahirkan suatu doktrin bahwa kekerasan terhadap kaum kafir merupakan tindakan yang benar menurut Syariat. Menurut kaum Islamis, pembunuhan terhadap kaum kafir dengan dalil menegakkan ajaran Syariat adalah tindakan suci membela Tuhan.<sup>4</sup>

Islamisme mengandaikan tatanan pemerintahan tertentu yang berlaku secara universal berdasarkan hukum Islam. Bassam Tibi sebagaimana dikutip oleh Daven, menjelaskan bahwa istilah Islamisme hendak menggambarkan perjuangan terbentuknya hukum Islam menjadi gerakan politik dan ideologi yang berlaku secara universal.<sup>5</sup> Adapun munculnya gerakan ideologi Islamisme dapat dianalisis sebagai usaha menghancurkan peradaban Barat yang merusak dunia Islam. Realitas ini kemudian menginspirasi dua orang muda Mesir yakni Hassan al-Bana dan Sayyid Qutb untuk memelopori gerakan perlawanan terhadap Barat melalui pembentukan *Ikhwanul Muslimin*. *Ikhwanul Muslimin* didirikan oleh Hasan al-Bana pada tahun 1928 untuk mengontrol peradaban Barat yang dianggap menghancurkan moral Mesir.<sup>6</sup> Menurut al-Bana, pembentukan *Ikhwanul Muslimin* bertujuan untuk merealisasikan ajaran Syariat dalam negara muslim Arab. Menurut al-Banna, kaum muslim harus mengikuti seluruh kaidah Syariat dan menanggalkan produk-produk peradaban Barat.<sup>7</sup>

Pemikiran-pemikiran al-Banna terinspirasi dari Kelompok Asosiasi Pemuda Muslim (YMMA) yang didirikan tahun 1927. Adapun poin-poin tersebut ialah melaksanakan hukum Syariat, menjunjung tinggi persatuan kaum muslim, mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern, dan menegakkan Khilafah Islam.

---

<sup>3</sup>Yosef Keladu Koten, “Kampanye Strategis Melawan Radikalisme: Merancang Model Pendidikan Multikultural”, *Jurnal Ledalero*, Vol. 17, No. 1 (Ledalero: Juni 2018), hlm. 7.

<sup>4</sup>Armada Riyanto, *Agama-Kekerasan: Membongkar Eksklusivisme* (Malang: Dioma, 2000), hlm. 18.

<sup>5</sup>Mathias Daven, “Politik Atas Nama Allah”, dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger (ed.), *Hidup Sebuah Pertanyaan: Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero* (Maumere: Ledalero, 2019), hlm. 98.

<sup>6</sup>Mathias Daven, “Politik Atas Nama Allah”, *Jurnal Ledalero*, Vol. 18, No.1 (Ledalero: Juni 2019), hlm. 27.

<sup>7</sup>Ishak Mussa Al Musaini, *Ikhwanul Muslimin* (Jakarta: Grafiti Pers: 1983), hlm. 21.

Dalam mentransformasi pemikiran politiknya, Hassan al-Bana banyak melakukan dakwah di masjid serta memanfaatkan surat kabar dalam organisasinya. Namun ketika dipimpin Sayyid Qutb, *Ikhwanul Muslimin* berkembang menjadi organisasi yang melegalkan kekerasan dalam melawan peradaban Barat. Sayyid Qutb terlibat dalam perang melawan presiden Mesir Gamal Abdel Nasser sebagai representasi peradaban Barat. Sayyid Qutb memahami tugas politik sebagai panggung pertarungan antara kebaikan (Islam) dan kejahatan (kaum kafir).<sup>8</sup>

Perang melawan Gamal Abdel Nasser nyatanya semakin melemahkan eksistensi politik *Ikhwanul Muslimin* karena mengalami kekalahan dalam perang. Namun meskipun kalah, perjuangan *Ikhwanul Muslimin* menyadarkan kaum muslim akan kewajiban membela negara dan agama Islam. Gerakan ini melahirkan pan-Arabisme dan pan-Islamisme yang bertujuan melawan hegemoni Barat dan Israel karena mengancam keberadaan negara-negara Arab dan agama Islam.<sup>9</sup> Salah satu tokoh muslim yang terinspirasi dari perjuangan *Ikhwanul Muslimin* ialah Syeik Taqiyuddin an-Nabhani, seorang ustaz lulusan Al-Azhar. Ia mendirikan Hizb ut-Tahrir (HT) yakni partai berideologi Islam yang bertujuan menegakkan hukum Islam untuk melawan dominasi Barat.

HT didirikan pada tahun 1952 di Yerusalem bagian Timur yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Yordania. An-Nabhani mengaku kecewa dengan *Ikhwanul Muslimin* karena dianggap lunak terhadap Barat. Hassan al-Banna cenderung membenarkan sistem demokrasi parlementer peradaban Barat meskipun menolak sistem multipartai di negara Islam.<sup>10</sup> HT kemudian muncul sebagai wadah melawan peradaban Barat melalui pendirian negara Islam berlandaskan hukum Syariat. HT memandang Khilafah sebagai perekat utama bagi kaum muslim di seluruh dunia dalam melawan Israel, Amerika, dan Paus Roma.<sup>11</sup> Adapun dalam menarik simpati masyarakat muslim Arab, HT menegaskan bahwa pemikiran politiknya merupakan ajaran asli agama Islam. Gerakan politik HT dapat dilakukan baik secara legal melalui izin hukum

---

<sup>8</sup> Mathias Daven, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>9</sup> Ismatilah A. Nu'ad, *Fundamentalisme Progresif: Era Baru Dunia Islam* (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 103.

<sup>10</sup> Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (eds), *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>11</sup> Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 4.

organisasi oleh sebuah negara maupun secara kekerasan dan pembunuhan. Kekerasan yang dilakukan meliputi kekerasan doktrinal, tradisi, dan sosiologis.<sup>12</sup> Kekerasan doktrinal yaitu klaim kebenaran absolut terhadap ayat-ayat Al-qur'an. Kekerasan tradisi yakni dampak turunan kekerasan doktrinal mengklasifikasi kelompok di luar HT sebagai orang kafir. Kekerasan sosiologis yakni tindakan-tindakan anarkis terhadap orang-orang yang dikategorisasi sebagai orang kafir. Kekerasan sosiologis oleh HTI berkaitan dengan pemusnahan pihak lain yang dianggap musyrik, murtad, dan kafir.<sup>13</sup>

Perjuangan mendirikan negara Islam berbasis Syariat Islam mendorong HT menanamkan pengaruh-pengaruhnya pada seluruh masyarakat muslim. Salah satu wadah perjuangan HT mengimplementasikan Islamisme di Indonesia ialah HTI. Melalui organisasi ini, Islamisme berkembang di Indonesia dengan gagasan pan-Islamisme yakni mendirikan Khilafah Islamiyyah dunia termasuk Indonesia.<sup>14</sup> Gerakan HT pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1983 melalui Ustaz Abdurrahman al-Baghdadi, seorang anggota HT dari Yordania. HTI memandang penyebaran di Indonesia sebagai langkah penting untuk kemajuan Islamisme. HTI berpendapat bahwa karakteristik Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, menjadi peluang didirikannya Negara Islam.<sup>15</sup> Dengan demikian, visi politik HTI sebagai bagian dari Islamisme hadir sebagai ancaman terhadap ideologi Pancasila sehingga merupakan musuh masyarakat plural.

Usaha HTI dalam memperjuangkan visi politiknya terlihat jelas dalam ajang kontestasi politik pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Pada saat itu, HTI tidak mendukung kedua calon baik Jokowi maupun Prabowo Subianto dengan argumentasi bahwa demokrasi adalah bentuk peradaban Barat. Selain itu, HTI berpendapat bahwa kedua calon presiden tersebut tidak sesuai dengan kriteria Islam. Menariknya, HTI menggunakan argumen-argumen yang disampaikan kedua kandidat selama kampanye untuk membenarkan diri. Salah

---

<sup>12</sup> Zainal Habib, "Kyai Kampung, Islamisme, dan Ketahanan Budaya Lokal: Pandangan Kyai Abdullah Faishol tentang Ketahanan Budaya dan Visi NU Sukaharjo", *Jurnal SMART*, 4:2 (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang: Desember 2018), hlm. 167.

<sup>13</sup> Kholid Mawardi, "Fundamentalisme dan Gerakan Politik Identitas", *Komunika*, Vol. 7, No. 1 (UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto: Januari-juni 2013), hlm. 8.

<sup>14</sup> Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 78.

<sup>15</sup> Ainur Rofiq Al-Amin, *op. cit.*, hlm. 4-5.

satu pesan awal Prabowo saat kampanye menegaskan bahwa Jokowi adalah calon presiden boneka Megawati Soekarnoputri dari Partai PDIP yang nasionalis. HTI menganggap Jokowi sebagai instrumen kepentingan asing seperti Amerika Serikat, Vatikan dan konglomerat-konglomerat Tiongkok.<sup>16</sup> Sikap HTI tersebut juga berlaku bagi Prabowo Subianto, dengan tuduhan sebagai boneka kepentingan bisnis Orde Baru. Bahkan HTI berpendapat bahwa semua presiden Indonesia dari Soekarno sampai Jokowi adalah produk bagi kepentingan neo-kolonial.

Selain itu, penolakan HTI terhadap demokrasi juga nyata dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama atas peristiwa penodaan agama Islam. HTI bersama FPI serta aliansi umat muslim melakukan demonstrasi menuntut hukuman bagi Ahok. Aliansi umat muslim melakukan aksi demonstrasi 212 menuntut hukuman pidana bagi Ahok karena menista agama Islam.<sup>17</sup> Namun dalam konteks tertentu, hal ini bersifat politis untuk mencegah orang-orang non-muslim menjadi pemimpin atas orang muslim. Menurut HTI, tipikal calon pemimpin Negara Indonesia harus mempertahankan hukum Syariat dan menjalankan program sesuai dengan cita-cita Islam. Pemimpin Indonesia harus berasal dari latar belakang Islam, bukan partai sekuler, dan wajib menyebarkan agama Islam melalui dakwah.<sup>18</sup> Kriteria yang ditawarkan HTI hendak merealisasikan pendirian Khilafah Indonesia sebagai bagian dari Khilafah internasional. Meskipun HTI sudah dilarang dan dibubarkan secara hukum di Indonesia, namun pemikirannya tetap dihayati oleh kaum Islam garis keras, bahkan mempengaruhi pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam aksi 212, terdapat tokoh-tokoh Islam garis keras, pemerintah, partai politik, dan Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI yang terlibat dalam demonstrasi.<sup>19</sup>

Menyadari bahaya HTI bagi kemajemukan bangsa Indonesia, penulis merasa tertarik untuk menganalisis eksistensi HTI dari perspektif masyarakat plural. Adapun penulis menggunakan konsep Masyarakat Terbuka Karl Popper yang menekankan prinsip kebebasan dan tanggung jawab individu. Menurut Popper, Masyarakat Terbuka adalah masyarakat demokratis yang terbuka terhadap

---

<sup>16</sup> Gwenaël Njoto-Feillard, *Hizbut Tahrir Indonesia in 2014: The Political Economy of Discontent* (Singapore: ISEAS, 2015), hlm. 8.

<sup>17</sup> Yusril Fahmi Adam, "Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia", *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2 (IAIN Palangka Raya: Desember 2022), hlm. 96.

<sup>18</sup> Gwenaël Njoto-Feillard, *op. cit.*, hlm. 9-10.

<sup>19</sup> Yusril Fahmi Adam, *op. cit.*, hlm. 96-97.

diskursus klaim kebenaran dari semua orang. Masyarakat Terbuka adalah komunitas pertemuan antara manusia dengan berbagai keputusan dan tanggung jawab pribadi yang bersifat rasional.<sup>20</sup> Hal ini hendak menegaskan bahwa Masyarakat Terbuka adalah masyarakat toleran dan bersolider dengan pihak lain melalui kompromi dan diskusi kritis.

Menurut Popper, kesalahan adalah kepastian sedangkan kebenaran merupakan kemungkinan. Hal ini didasarkan pada kritiknya terhadap positivisme yang cenderung menekankan metode verifikasi dan Marxisme yang bersifat dogmatis.<sup>21</sup> Popper hendak menekankan sikap kritis dengan tidak mencari pembenaran diri terhadap suatu kesalahan. Dengan demikian, Masyarakat Terbuka harus terbuka terhadap metode ilmiah, belajar dari setiap kesalahan dan memperbaikinya secara rasional. Dalam konteks politik, Popper memandang politik bukan perihal benar-salah melainkan baik-buruk sehingga dapat menciptakan kebaikan bersama. Dengan demikian, karya ilmiah ini hendak membedah eksistensi HTI sebagai ancaman bagi masyarakat plural berdasarkan gagasan filsafat politik politik Karl Popper dalam sebuah judul: **HIZB UT-TAHRIR INDONESIA SEBAGAI MUSUH MASYARAKAT TERBUKA: KRITIK IDEOLOGI HIZB UT-TAHRIR INDONESIA DITILIK DARI FILSAFAT POLITIK KARL POPPER.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama dalam tulisan ini adalah sejauh mana Hizb ut-Tahrir Indonesia merupakan ancaman serius bagi Masyarakat Terbuka ditilik dari perspektif Filsafat Politik Karl Popper? Rumusan masalah utama ini kemudian diperinci dalam beberapa pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana pemikiran politik Hizb ut-Tahrir Indonesia serta bertumbuh dan berkembangnya di Indonesia?
- 2) Bagaimana konsep Masyarakat Terbuka menurut Karl Popper?

---

<sup>20</sup> Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, penerj. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 214.

<sup>21</sup> Maydi Aula Riski, "Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper: Urgensi Pemikirannya dalam Dunia Akademik", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4, No. 3 (Universitas Pendidikan Ganesha, 2021), hlm. 263.

- 3) Sejauh mana relevansi filsafat politik Karl Popper dalam memberikan kritik terhadap ideologi Hizb ut-Tahrir Indonesia?

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Adapun, beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan artikel ini antara lain: Pertama, skripsi dengan judul: Relevansi Gagasan Masyarakat Terbuka Karl Popper Bagi Kritik Terhadap Ideologi Islamisme (Oleh: Apolinaris Hendra Asian Jaya Kumpul, IFTK Ledalero, 2021). Skripsi ini lebih membahas gerakan ideologi Islamisme secara umum di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gagasan masyarakat terbuka Karl Popper, mendeskripsikan ideologi Islamisme, dan menjelaskan dan mendeskripsikan aktualitas gagasan masyarakat terbuka Karl Popper bagi kritik terhadap ideologi Islamisme.

Kedua, skripsi dengan judul: Islamisme di Indonesia sebagai Musuh Masyarakat Terbuka dalam Pemikiran Karl Popper (Oleh: Jedilio Joadzino Monteiro, IFTK Ledalero, 2023). Skripsi ini membahas tentang Islamisme di Indonesia, namun lebih spesifik mengkaji organisasi Front Pembela Islam (FPI) sebagai transformasi ideologi Islamisme di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam persetujuan dalam menentukan ideologi negara Indonesia, dan FPI sebagai transformasi ideologi Islamisme di Indonesia.

Ketiga, artikel dengan judul: Epistemologi Falsifikasionisme Karl R. Popper: Relevansinya bagi Teologi Keislaman (Oleh: Asep Saepullah, 2020). Keempat, artikel dengan judul: Epistemologi Pemikiran Karl R. Popper dan Relevansinya dengan Pemikiran Islam (Oleh: Muhammad Yuslih, 2021). Kelima, artikel dengan judul: Metodologi Falsifikasi Karl R. Popper dan Implementasinya dalam Membangun Pemahaman inklusif (May Sarah dan M. Afiqu Adib, 2023).

Penulis memandang tema tentang Hizb ut-Tahrir Indonesia belum pernah dikaji secara khusus pada kedua karya skripsi sebelumnya. Visi politik HTI juga lebih radikal dibandingkan dengan FPI dan organisasi Islam garis keras lainnya di Indonesia. Selain itu, artikel yang ditulis Asep Saepullah dan Muhammad Yuslih hanya membahas relevansi pemikiran Popper pada bidang teologi Islam. Sedangkan artikel yang ditulis May Sarah dan M. Afiqu Adib lebih fokus pada konteks hukum dan sosial masyarakat. Dengan demikian, skripsi dengan judul **Hizb ut-Tahrir Indonesia sebagai Musuh Masyarakat Terbuka: Kritik**

**Ideologi Hizb ut-Tahrir Indonesia Ditilik dari Filsafat Politik Karl Popper** merupakan satu-satunya tulisan yang pertama kali membahas HTI dari sudut pandang filsafat politik.

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan utama penulisan dari karya ilmiah ini adalah: *pertama*, membedah sejauh mana Hizb ut-Tahrir Indonesia merupakan musuh Masyarakat Terbuka ditilik dari filsafat politik Karl Popper. *Kedua*, tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar Strata satu (S1) di program studi filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

#### **1.5 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan gerakan Islamisme dalam Hizb ut-Tahrir Indonesia sebagai musuh Masyarakat Terbuka dan relevansi filsafat politik Karl Popper dalam mengkritisi ideologi Hizb ut-Tahrir Indonesia. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Penulis membaca dan menganalisis data-data sekunder seperti buku, jurnal, dan majalah yang terdapat di perpustakaan Ledalero dan Ritapiret, serta koleksi buku pribadi. (2) Untuk mendalami lebih lanjut tema yang dibahas, penulis juga mengadakan diskusi dengan berbagai pihak, menerima kritik, serta masukan ide-ide terkait tema yang sedang dianalisis.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Karya tulis ilmiah ini terdiri-dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut: *Bab Pertama*; menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. *Bab Kedua*; membahas HTI dalam bentangan sejarah, pemikiran politik dan peran HTI sebagai gerakan Islamisme di Indonesia. *Bab Ketiga*; menyajikan biografi, karya-karya, pemikiran filosofis serta konsep Masyarakat Terbuka Karl Popper. *Bab Keempat*; menganalisis relevansi gagasan Masyarakat Terbuka Karl Popper terhadap kritik ideologi HTI. *Bab Kelima*; menyajikan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran.